RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2021

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. A. Satriawijaya No. 2 Telp./fax. (0253) 201003 Pandeglang 42213

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR :

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 – 2026

KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2031;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2026.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini sebagai dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

KEDUA : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang

Drs. ISKANDAR, MM
NIP. 196303031984021001

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana agenda kerja lima tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang harus menyesuaikan dari segi tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, substansi dan perubahan yang mendasar.

Rancangan Rencana strategis ini merupakan salah satu dokumen pegangan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Bertitik tolak pada tugas dan fungsi BPKD Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2021-2026 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : (1) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta (2) pengelolaan barang milik daerah yang auditabel.

Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rancangan rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan rancangan rencana strategis tahun 2021-2026 dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan dan barang milik daerah yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam rencana kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada serta kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

Tidak ada gading yang tak retak, kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan dokumen rencana strategis selanjutnya. Besar harapan kami agar rencana strategis ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan BPKD Kabupaten Pandeglang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI Ii
DAFTAR TABEL Iii
DAFTAR GAMBAR Iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKD KAB. PANDEGLANG . 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang 7
2.2. Sumber Daya BPKD Kabupaten Pandeglang 37
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD..... 40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 58

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 59
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Pandeglang 59
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 61
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Keuangan 62
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 68
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis 68

BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**.....	69
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	69
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	74
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	76
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**.....	89
BAB VIII	**PENUTUP**	92

DAFTAR TABEL

1		Jumlah Pegawai DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Tahun 2021.....	38
2		Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan, Tahun 2021.....	39
3		Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKA/BPKD Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Esselon, Tahun 2021.....	39
4	Tabel 3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	43
5	Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
6	Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKD Kab. Pandeglang	54
7	Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang	57
8	Tabel 7	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	89

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1	Persentase Jumlah Pegawai DPKA/BPKD	38

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPKD KABUPATEN PANDEGLANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah , dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir b, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi :

a) Penyusunan perencanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
b) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Rincian Tugas

1). Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
   b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian;
   c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
   d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan kearsipan;
   e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
   f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilingkup Badan;
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

i. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

ii. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;

iii. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kegiatan badan;
- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

iv. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- Mengkonsolidasikan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja lingkup Badan;
- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- Mengelola aplikasi / teknologi informasi lingkup Badan;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- Merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kepada Sekretaris;
- Memberi petunjuk, saran dan masukan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Merencanakan dan merumuskan bahan kebijakan program kerja di Bidang Anggaran Badan;
- Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA Badan;
- Merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan TAPKIN dan LAKIP melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke kepala badan melalui Sekretaris;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Badan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran;
- Merencanakan kegiatan penyusunan RKA/DPA, DPPA dan unit kerja internal Badan;
- Merencanakan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja di lingkungan Badan melalui Sekretaris;

- Menyusun rencana kegiatan anggaran RKA, DPA, DPPA dan kebutuhan anggaran kas di lingkungan Badan; dan
- Melaksanakan dan melaporkan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

i. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;

ii. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan persediaan barang dan Barang Milik Daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- Menatausahakan persediaan barang milik Badan;
- Menatausahakan aset tetap, aset bergerak dan aset lainnya lingkup Badan; dan
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan.

iv. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
- merencanakan kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan;

- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan badan;
- Melaksanakan penyusunan laporan persediaan dan barang milik daerah SKPD bulanan, semesteran dan tahunan;
- Melaksanakan pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penatausahaan keuangan badan;
- Merencanakan kegiatan, menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati, LPPD, LKPD dan LAKIP sesuai dengan bidang tugas Badan;
- Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA/DPA, DPPA unit kerja urusan keuangan sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran;
- Merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- Merencanakan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan RENJA tahunan Badan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan;

ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf ii, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

iv. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan Perpustakaan Badan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- Melaksanakan pengurusan pengadaan barang/jasa;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Badan;
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta penerima penghargaan;
- Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

- Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- Mengelola server dan jaringan teknologi informasi dan mengamankan data pada server;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

(1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang perbendaharaan dan kas daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
b. Pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
c. Pelaksanaan dan pengendalian pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;

d. Penyusunan petunjuk teknis, sistem dan prosedur serta pembinaan administrasi penatausahaan keuangan;
e. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan supervise yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kas daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :

a. Subbid Perbendaharaan

i. Subbid Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
ii. Subbid Perbendaharaan mempunyai tugas pokok meneliti dan menguji Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengelola Belanja Gaji PNS;
iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Perbendaharaan mempunyai fungsi :
    - Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Perbendaharaan;
    - Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis Subbid Perbendaharaan;
    - Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan serta petunjuk teknis pengelolaan gaji PNS; dan
    - Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Perbendaharaan;
iv. Rincian tugas Subbid Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
    - Menyusun rencana kerja dan kegiatan subbid Perbendaharaan;

- Melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Perintah Pencairan Dana (SP3D);
- Melaksanakan penelitian dan pengendalian atas pagu anggaran dan Anggaran Kas sebagaimana tertuang dalam DPA/DPPA SKPD/PPKD;
- Melaksanakan penelitian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapan dokumen lainnya yang dipersyaratkan;
- Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Penolakan Perintah Pencairan Dana (SP3D);
- Melaksanakan pencatatan administrasi dan laporan pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh BUD;
- Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan Realisasi belanja gaji berikut jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan PNS SKPD;
- Melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan atas Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Tabungan Perumahan (Taperum);
- Melaksanakan rekonsiliasi data pegawai penerima gaji di SKPD dan melakukan verifikasi kesesuaian bersama Badan Kepegawaian dan Diklat;
- Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan pihak TASPEN terkait pengelolaan dan pelaporan belanja gaji dan tunjangan PNS;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Perbendaharaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer

i. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

ii. Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah dan Dana Transfer;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer;
- Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan serta petunjuk teknis pengelolaan kas daerah dan dana transfer;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer.

iv. Rincian tugas Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kas Daerah dan Dana Transfer
- Menyusun rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- Melaksanakan penerbitan Daftar Penguji/ (Advis List) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan dokumen SP2D;
- Melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran serta menjaga Likuiditas uang Kas Daerah;
- Melaksanakan verifikasi dan validasi atas bukti penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran;
- Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau tanda terima lainnya dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD terkait;
- Menyusun laporan Posisi Kas Harian dan rekonsiliasi atas penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Bank penyelenggara Kas daerah;
- Menyusun Laporan Aliran Kas Daerah secara periodik (Semesteran dan Tahunan);
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap saldo Kas bendahara SKPD secara periodik;
- Melaksanakan fasilitasi penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan dana transfer dan bantuan keuangan provinsi;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan atas penyerapan dana transfer dan bantuan keuangan provinsi;
- Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi terkait penyaluran Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Kas Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

i. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala subbid yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

ii. Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan kebijakan Penatausahaan Keuangan Daerah, fasilitasi penyelenggaraan transaksi Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis transaksi Pemerintah Daerah;
- Fasilitasi, kordinasi dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
- Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- Pelaksanaan supervisi dan pembinaan umum penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;

iv. Rincian tugas Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Kerja dan Kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- Memfasilitasi Rumusan Kebijakan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- Memfasilitasi penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu SKPD;
- Memfasilitasi bahan penetapan pejabat yang diberi kewenangan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang piutang daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan penatausahaan keuangan daerah SKPD, BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk pembinaan pengelolaan Dana Desa dan dana Kapitasi JKN;
- Fasilitasi penyelenggaraan transaksi Pemerintah Daerah yang meliputi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan Desa, Belanja Dana Desa dan belanja tidak terduga;
- Melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Fungsional SKPD;
- Melaksanakan Pencatatan dan Penelitian atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagai dasar diterbitkannya surat pengesahan penetapan dan belanja (SP2B) dana Kapitasi JKN dan FKTP;
- Melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi Pendapatan dan Belanja dana kapitasi JKN bersama FKTP secara periodik;
- Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3). Bidang Akuntansi

(1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, serta memberikan petunjuk teknis tentang kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka penyusunan dan penyajian informasi serta laporan keuangan daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 2, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang akuntansi;

b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan akuntansi SKPD serta akuntansi PPKD;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD dan PPKD serta Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi

i. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;

ii. Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan akuntansi pengeluaran SKPD dengan Bendahara Umum Daerah, serta melaksanakan pembinaan akuntansi SKPD;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi;
- Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi; dan
- Penyelenggaraan kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi.

iv. Rincian tugas Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi;
- Melaksanakan rekonsiliasi dari pencatatan transaksi-transaksi pendapatan, belanja dan selain Kas berdasarkan bukti-bukti memorial yang terdapat pada SKPD dan SKPKD;
- Menyusun surat peringatan atas keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi laporan realisasi pendapatan, belanja dan selain kas;
- Melaksanakan pembinaan secara periodik terhadap pelaksanaan akuntansi SKPD dan SKPKD;
- Menyusun program pembinaan dan pelatihan akuntansi SKPD dan SKPKD;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Akuntansi PPKD

i. Subbid Akuntansi PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;

ii. Subbid Akuntansi PPKD mempunyai tugas pokok mencatat transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh PPKD dan melaksanakan jurnal konsolidasi transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Akuntansi PPKD mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan akuntansi PPKD;
- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan akuntansi PPKD; dan
- Penyelenggaraan kegiatan akuntansi PPKD.

iv. Rincian tugas Subbid Akuntansi PPKD adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Akuntansi PPKD;
- Melaksanakan kebijakan dan Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Melaksanakan pencatatan transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Pendapatan- LO, Pendapatan- LRA, belanja dan beban;
- Melaksanakan jurnal konsolidasi RK SKPD dan RK PPKD;
- Melaksanakan pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Investasi;
- Melaksanakan pengakuntansian atas transaksi yang berkenaan dengan Utang dan Piutang Daerah atas Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

- Melaksanakan pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan akuntansi selain kas;
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan PPKD secara periodik, terdiri dari laporan: realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
- Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan LO, pendapatan- LRA, belanja dan beban PPKD;
- Memfasilitasi dan melaksanakan Asistensi RKA/RKPA-PPKD bersama dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD;
- Memfasilitasi dan melaksanakan Verifikasi DPA/DPPA-PPKD bersama dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Akuntansi PPKD; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah

i. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi;

ii. Subbid Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban APBD;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- Penyelenggaraan kegiatan pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

iv. Rincian tugas Subbid Pelaporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Pelaporan Keuangan Daerah;
- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik, yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Menyusun laporan keuangan dana tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada entitas akuntansi pemerintah daerah;
- Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (konsolidasian) secara periodik kepada pihak pengguna laporan keuangan, termasuk laporan keuangan dana tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada entitas akuntansi pemerintah daerah;
- Menyiapkan data, laporan dan koordinasi persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pelaporan Keuangan Daerah; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4). Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penyusunan Anggaran;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 2, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;

b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran;

c. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan, pembinaan dan evaluasi anggaran; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Anggaran terdiri dari :

a. Subbid Penyusunan Anggaran

i. Subbid Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;

ii. Subbid Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang

perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

iv. Rincian tugas Subbid Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan subbid penyusunan anggaran;
- Mengkonsolidasikan usulan rencana kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD/PPKD berdasarkan RKA/RKPA SKPD/PPKD;

- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD);
- Melaksanakan sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD);
- Memfasilitasi pelaksanaan asistensi dokumen RKA-SKPD/PPKD dan RKPA-SKPD/PPKD;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan nota keuangan dan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta nota keuangan dan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Menyusun RKA/RKPA-PPKD dan DPA/DPPA-PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid penyusunan anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Kebijakan Anggaran

i. Subbid Kebijakan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;

ii. Subbid Kebijakan Anggaran mempunyai tugas pokok memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen-dokumen kebijakan dan Pembinaan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- Penyiapan data dan dokumen yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen-dokumen kebijakan dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

iv. Rincian tugas Subbid Kebijakan Anggaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Kebijakan Anggaran;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan perda, rancangan perbup dan rancangan Kepbup mengenai retribusi daerah;

- Memfasilitasi penyusunan rancangan perda, rancangan perbup dan rancangan Kepbup mengenai lain - lain PAD yang sah;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati mengenai pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen kebijakan PPKD;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan Stándar Satuan Harga belanja, honorarium dan sewa;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan SSH yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas;
- Memfasilitasi penyusunan rancangan dokumen Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyiapkan rancangan kebijakan dalam pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi pelaksanaan supervisi dokumen-dokumen kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan/atau workshop dokumen-dokumen kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;

- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi E-Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Pandeglang;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid kebijakan anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

i. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran;

ii. Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi terhadap proses penyusunan Anggaran;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan Pelaksanaan Anggaran; dan
- Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

iv. Rincian tugas Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi APBD/Perubahan APBD pada rekening pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pelaksanaan verifikasi Rancangan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD dan pergeseran DPA-SKPD/PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pengesahan DPA/DPPA/DPA Pergeseran SKPD/PPKD;
- Melakukan dokumentasi dan fasilitasi pembinaan dan evaluasi lainnya dalam pelaksanaan APBD/Perubahan APBD;
- Memfasilitasi Pengelolaan menu Aplikasi Penganggaran pada Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah atau aplikasi lainnya;
- Melaksanakan perporasi atas barang koasi SKPD penghasil;
- Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah;
- Mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan penganggaran atas rekomendasi hasil pengawasan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5). Bidang Barang Milik Daerah.

(1) Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pengamanan, penilaian, penghapusan dan pemberdayaan serta penatausahaan barang milik daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 2, Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah;
b. Penyusunan perencanaan pengelolaan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan barang milik daerah mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan serta pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :

a. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

i. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;
ii. Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pengamanan barang milik daerah;
iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
   - Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah;

- Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pengamanan barang milik daerah;
- Penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan dan pengamanan barang milik daerah.

iv. Rincian tugas Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- Menyusun kebijakan standar perencanaan, pengadaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
- Menyusun kebijakan standarisasi sarana dan prasarana, harga dan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- Membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah secara periodik;
- Melaksanakan pengadaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengamanan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi mengenai tata cara perencanaan, pengadaan dan pengamanan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan inventarisasi / sensus Barang Milik Daerah dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan pengelolaan tindak tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TPTGR);
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah

i. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;

ii. Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan barang milik daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir ii, Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Penyelenggaraan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah; dan
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah.

iv. Rincian tugas Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penilaian, penghapusan dan Pemberdayaan barang milik daerah;
- Menyusun kebijakan standar penilaian, penghapusan dan pemberdayaan barang milik daerah;
- Menyusun prosedur dan melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah;

- Melaksanakan kebijakan teknis dalam penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi mengenai tata cara penilaian, penghapusan dan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Memfasilitasi kebijakan pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Pemberdayaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

i. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah;

ii. Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penatausahaan barang milik daearah;
- Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- Penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah;
- pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penatausahaan barang milik daerah.

iv. Rincian tugas Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- Menyusun bahan kebijakan standar penataausahaan barang milik daerah mengenai pembukuan dan penyimpanan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah;
- Melakukan inventarisasi barang milik daerah;
- Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen dan klasifikasi barang milik daerah;
- Melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun data dasar neraca aset;
- Melaksanakan fasilitas legal audit Barang Milik Daerah;
- Menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan Barang Milik Daerah;
- Memfasilitasi penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelola barang milik daerah;
- Mengelola dan melakukan fasilitasi pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Modul Persediaan dan Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Melaksanakan Pencatatan atas transaksi yang berkenaan dengan Akuntansi Aset tetap;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbid Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya BPKD Kabupaten Pandeglang

Salah satu sumber daya yang memegang peran penting dalam menjalankan organisasi adalah sumber daya manusia. Pada Tahun 2021 jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebanyak 95 orang, terdiri dari 65 orang PNS, 6 Orang TKK dan 24 Orang TKS.

Dengan kondisi tersebut, maka persentase jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian pada BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

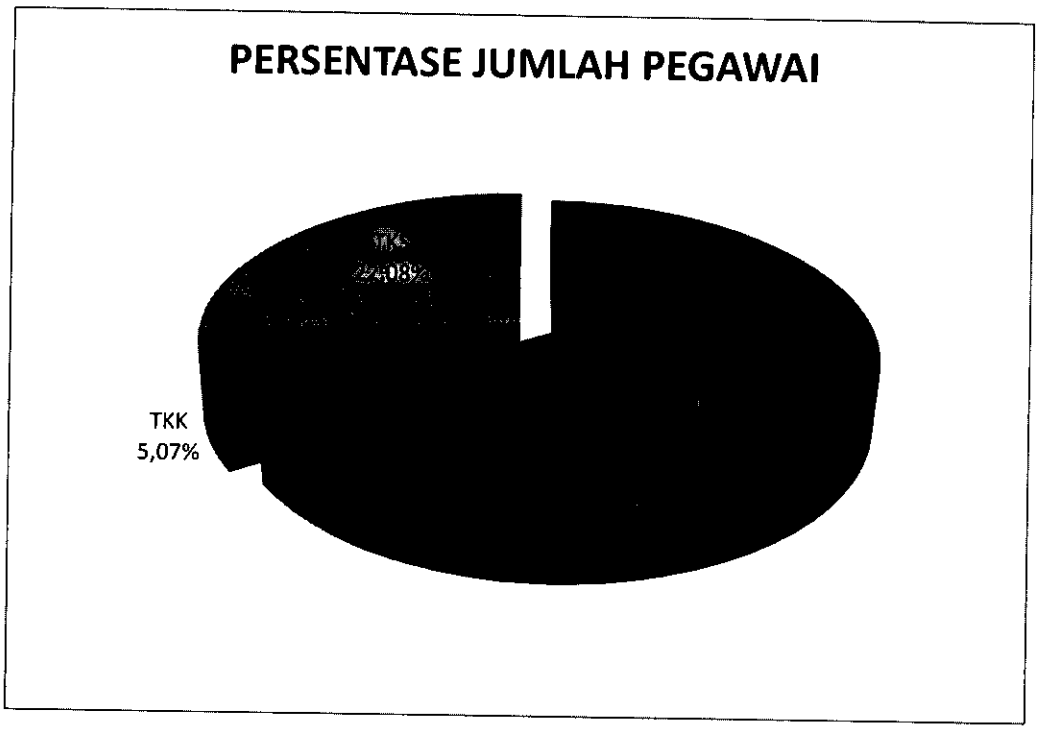

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kondisi pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1. S2	11
2. S1	40
3. D III	3
4. SLTA	11
5. SLTP	-
6. SD	-
JUMLAH	65

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan, kondisi pegawai BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan Tahun 2021.

PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1. Golongan IV	5
2. Golongan III	50
3. Golongan II	10
4. Golongan I	-
JUMLAH	65

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional pada BPKD Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan kualifikasi Esselon Tahun 2021.

JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH PEGAWAI
1. Esselon II.b	1
2. Esselon III.a	1
3. Esselon III.b	4
4. Esselon IV.a	13
5. Non Esselon	46
JUMLAH	65

Selain keberadaan sumber daya manusia, sumber daya lain yang memegang peranan penting dalam menunjang kinerja yang lebih baik adalah keberadaan asset, beberapa asset penunjang kinerja yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang antara lain sebagai berikut :

1) Gedung Kantor : 2 gedung
2) Aula Besar : 1 ruangan

3) Aula Kecil	:	1	ruangan
4) Ruang Arsip	:	1	ruangan
5) Kendaraan Dinas Roda 4	:	16	unit
6) Kendaraan Dinas Roda 2	:	24	unit
7) Komputer Server	:	1	unit
8) Sistem Aplikasi	:	2	Aplikasi
9) Komputer PC	:	35	unit
10) Laptop	:	40	unit

Dari beberapa asset penunjang kinerja di atas, BPKD menggunakan dua sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan kewajiban bagi seluruh daerah untuk menggunakan aplikasi tersebut dan aplikasi pendukung yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk membantu kelancaran kinerja dalam peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah dan penatausahaan barang daerah pada BPKD Kabupaten Pandeglang.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan daerah antara lain sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan.

Kinerja Pelayanan BPKD dapat terangkum dalam 3 poin penting, yaitu :

1. Fasilitasi Penyusunan Anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tepat waktu
2. Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah dapat Tersaji dan diyakini.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten pandeglang

No	Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target renstra SKPDTahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BELANJA LANGSUNG																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				100.00	100.00			
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				15 orang	12 bulan				15 orang	12 bulan				100.00	100.00			
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15 item	16 item				15 item	16 item				100.00	100.00			
4	Penyediaan komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				6 jenis barang	7 item				6 jenis barang	7 item				100.00	100.00			
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				9 jenis barang	27 Jenis barang	18 jenis	18 jenis barang	1 thn	9 jenis barang	27 Jenis barang	18 jenis	18 jenis barang	6 bulan	100.00	100.00	100.00		50.00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8 Jenis barang	16 Jenis Barang				8 Jenis barang	16 Jenis Barang				100.00	100.00			
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10 Buku	1 tahun				-									
8	Penyediaan Makanan dan Minuman				12 bulan	1 tahun				12 bulan	1 tahun				100.00	100.00			
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah				1 tahun	1 tahun	12 bulan	12 bulan	1 thn	1 tahun	1 tahun	12 bulan	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor				10 orang	1 tahun				10 orang	1 tahun				100.00	100.00			
11	Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan				950 hok	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	1 kegiatan	950 hok	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

12	Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan				18 barang	18 alat kebersihan				18 barang	18 alat kebersihan				100.00	100.00			
13	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang				12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	12 bulan			100.00	100.00	100.00		
14	Penyediaan Bahan Bakar				1 tahun					1 tahun					100.00				
15	Layanan administrasi kantor						12 bulan	12 bulan	12 bulan			12 bulan	12 bulan	6 bulan	100.00		100.00	100.00	50.00
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor					43 item		12 bulan			43 item		12 bulan			100.00		100.00	
17	Digitalisasi Dokumen Arsip Pengelolaan Keuangan Daerah					1 aplikasi					1 aplikasi					100.00			
18	Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab Pandeglang							12 bulan	1 tahun				12 bulan	6 bulan				100.00	50.00
19	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Tenaga Kerja Kontrak								1 tahun					6 bulan					50.00
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																		
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	2 jenis kendaraan	2 jenis kendaraan	2 jenis Kendaraan dinas	2 jenis Kendaraan dinas	1 tahun	2 jenis kendaraan	2 jenis kendaraan	2 jenis Kendaraan dinas	2 jenis Kendaraan dinas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	1 tahun	6 bulan		100.00	100.00	100.00	50.00
22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				78 unit	1 kegiatan				78 unit	1 kegiatan				100.00	100.00			
23	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik				1 tahun	1 kegiatan				1 tahun	1 kegiatan				100.00	100.00			
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				1 bangunan kantor	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 bangunan kantor	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100	100.00	100.00	100.00	
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas					1 Paket					1 Paket				-	100.00			
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan Roda Dua)				14 Unit					14 Unit					100.00				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
27	Pengadaan mebeleur						1 paket	1 tahun					1 tahun				-	100.00	

28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					1 tahun	1 kegiatan	1 kegiatan	1 tahun		1 tahun	1 kegiatan	1 kegiatan	6 bulan		100.00	100.00	100.00	50.00
29	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan LAN						1 tahun					1 tahun					100.00		
30	Pembangunan Gudang Arsip						1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan				100.00	100.00	
	Program peningkatan disiplin aparatur																		
31	Pengadaan Seragam Dinas PNS dan Atributnya					2 Jenis Pakaian	1 tahun				2 Jenis Pakaian	1 tahun				100.00	100.00		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																		
32	Pendidikan dan pelatihan formal				1 tahun	1 tahun	1 tahun	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
33	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dok laporan	1 dokumen				1 Dok. laporan	1 dokumen				100.00	100.00			
34	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan				12 Bulan	1 dokumen	15 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	12 Bulan	1 dokumen	15 dokumen	17 dokumen	9 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	52.94
35	Pengelolaan Aset SKPD				1 tahun	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	1 kegiatan	1 kegiatan	12 bulan	6 bulan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
36	Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)				1 kegiatan				1 dokumen	1 kegiatan					100.00				
37	Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP						1 tahun	12 bulan	1 tahun			1 tahun	12 bulan	6 bulan	100.00		100.00	100.00	50.00
	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi																		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
38	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				4 dok	8 dokumen	12 dokumen	18 Dokumen	15 Dokumen	4 dok	8 dokumen	12 dokumen	15 Dokumen	10 dokumen	100.00	100.00	100.00	83.33	66.67

39	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD				3 dok	3 dokumen	18 dokumen	53 Dokumen	16 Dokumen	3 dok	3 dokumen	18 dokumen	51 Dokumen	9 dokumen	100.00	100.00	100.00	96.23	56.25
40	Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP				12 dok	1 tahun				12 dok	1 tahun				100.00	100.00			
41	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis DPKPA				1 dokumen					1 dokumen					100.00				
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah																		
42	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 dokumen					1 dokumen					100.00				
43	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah				1 dokumen	130 buku dan 100 buku saku	1 kegiatan			1 dokumen	130 buku dan 100 buku saku	1 kegiatan			100.00	100.00	100.00		
44	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	1 LHP BPK RI	4 dokumen	1 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	1 LHP BPK RI	4 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 Perbup	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 Perbup	4 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
46	Peningkatan Manajemen Aset/ barang				1 kegiatan					1 kegiatan					100.00				
47	Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)				10.000 ply/ lembar	10.000 ply/ lembar	10.000 ply/ lembar	18.000 Ply/ lembar	12.000 Ply/ lembar	15.900 ply/ lembar	16.755 ply/ lembar	10.000 ply/ lembar	18.000 Ply/ lembar	5.000 Ply/ lembar	159.00	167.55	100.00	100.00	
48	a				12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran	12 laporan	12 laporan			12 laporan bulanan, 2 laporan semesteran	12 laporan	12 laporan				100.00	100.00		

49	Pelayanan Pengelolaan Gaji				12 buku, 984 berkas	12 Buku laporan realisasi Gaji 12 UP Grade Sistem Gaji 12 Laporan Buku Pembayaran SSB 12 laporan Bukti Pembayaran SSP 12 Laporan Bukti Pembayaran SSBP rekapitulasi Gaji	6 buku, 12 buku laporan realisasi gaji, up grade sistem gaji, laporanbukti pembayaran ssbp, rekapituladi gaji	60 Buku	40 buku laporan	12 buku, 984 berkas	12 Buku laporan realisasi Gaji 12 UP Grade Sistem Gaji 12 Laporan Buku Pembayaran SSB 12 laporan Bukti Pembayaran SSP 12 Laporan Bukti Pembayaran SSBP rekapitulasi Gaji	6 buku, 12 buku laporan realisasi gaji, up grade sistem gaji, laporanbukti pembayaran ssbp, rekapituladi gaji	60 Buku	19 buku laporan		100.00	100.00	100.00	47.50
50	Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD				82 dok.angkas, 400 do.SPD, 2 berkas MOU, 12 Lapporan, 12 buku, 350 dok, 12 laporan	4.000 lembar SPD, 2 MOU Bank Persepsi	4.000 lembar spd, 2 MOU bank persepsi, 82 SKPD		82 SKPD, 6 buku dokumen	82 dok.angkas, 400 do.SPD, 2 berkas MOU, 12 Lapporan, 12 buku, 350 dok, 12 laporan	2.075 lembar SPD, 2 MOU Bank Persepsi	4.000 lembar spd, 2 MOU bank persepsi, 82 SKPD		80 SKPD, 6 buku dokumen	100.00	51.88	100.00		97.56
51	Asistensi penyusunan SPT/restitusi PPh 21				15 Buku	dokumen PPh Pasal 21	1 dokumen PPh Pasal 21	1 dokumen		15 Buku		1 dokumen PPh Pasal 21			100.00		100.00	.	
52	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian							32 dokumen					32 dokumen					100.00	
53	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah							4.000 lembar	6 buku dokumen				4.000 lembar	3 buku dokumen				100.00	50.00
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD				12 bulan	1 tahun	82 laporan	82 laporan, 12 bulan	84 laporan	12 bulan	1 tahun	82 laporan	82 laporan, 12 bulan	42 laporan	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
55	Penyusunan Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD						3 dokumen	3 raperbup	3 Raperbup			3 dokumen	3 raperbup	1 raperbup			100.00	100.00	33.33
56	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)				1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
57	kegiatan Pendampingan SIPKD				12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				100.00	100.00			
58	Manajemen dan Pendampingan SIPKD							13 dokumen / Bulan	12 dokumen laporan				13 dokumen / Bulan	6 dokumen laporan				100.00	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
59	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran				12 bulan					12 bulan					100.00				
60	Pembinaan Bendahara SKPD				181 orang	181 oraang	181 orang	169 orang	250 orang	181 orang	164 oraang	164 oraang	169 orang	160 orang	100.00	90.61	100.00	100.00	
61	Bintek Bendahara SKPD				972 org					972 org					100.00				
62	Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
63	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD				1 dokumen	1 kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00
64	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah					1 berkas	1 Berkas	1 berkas	1 berkas		1 berkas	1 Berkas	1 berkas	1 berkas		100.00	100.00	100.00	100.00
						4 laporan	12 laporan	2 bank persepsi	2 bank persepsi		4 laporan	12 laporan	2 bank persepsi	2 bank persepsi		100.00	100.00	100.00	100.00
						30.000 lembar	30.000 lembar	24 buku laporan	24 buku laporan		10.500 lembar	10.500 lembar	24 buku laporan	12 buku laporan		35.00	35.00	100.00	50.00
						350 laporan	350 laporan	12 buku laporan	12 buku laporan		250 laporan	250 laporan	12 buku laporan	6 buku laporan		71.43	71.43	100.00	50.00
						12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan		100.00	100.00	100.00	50.00
66	Biaya Operasional Kegiatan PPKD					12 buku laporan PPKD	12 buku laporan PPKD	12 buku laporan	12 laporan		12 buku laporan PPKD	12 buku laporan PPKD	12 buku laporan	6 buku laporan		100.00	100.00	100.00	50.00
67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah					1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		100.00	100.00	100.00	100.00
68	Pengendalian dan pembinaan pelaksanaan anggaran					4 kali (4triwulan), 12 laporan	12 dokumen laporan				4 kali (4triwulan), 12 laporan	12 dokumen laporan				100.00	100.00		
69	Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD						4 laporan	4 dokumen				4 laporan	4 dokumen				100.00	100.00	
70	Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD						4 laporan	4 dokumen	4 dokumen			4 laporan	4 dokumen	-			100.00	100.00	-
71	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD						82 dokumen	82 SKPD	82 SKPD			82 dokumen	82 SKPD	80 SKPD			100.00	100.00	97.56
72	Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	-			100.00	100.00	
73	Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)						1 kegiatan	1 kegiatan/ 241 orang	1 kegiatan/ 241 peserta			1 kegiatan	1 kegiatan/ 241 orang	-			100.00	100.00	-
74	Penyusunan APBD dan perubahan APBD						2 dok, 1 kegiatan	2 Raperda	2 Raperda			2 dok, 1 kegiatan	2 Raperda	1 Raperda			100.00	100.00	50.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

75	Penyusunan APBD				1 perda	1 perda, 99 buku APBD 2012, 25 buku raperda apbd 2013, 45 buku perda apbd 2013				1 perda	1 perda, 99 buku APBD 2012, 25 buku raperda apbd 2013, 45 buku perda apbd 2013				100.00	100.00			
76	Penyusunan Penjabaran APBD				1 dok raperbup	1 dokumen perbup penjabaran apbd, 100 buku				1 dok raperbup	1 dokumen perbup penjabaran apbd, 100 buku				100.00	100.00			
77	Penyusunan Perubahan APBD				1 perda	1 dokumen, 110 buku				1 perda	1 dokumen, 110 buku				100.00	100.00			
78	Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD				1 dok raperbup	1 dokumen, 120 buku				1 dok raperbup	1 dokumen, 120 buku				100.00	100.00			
79	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah				1 dokumen	1 kegiatan				1 dokumen	1 kegiatan				100.00	100.00			
80	Penyusunan Raperbup tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten pandeglang					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
81	Penyusunan Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah kabupaten pandeglang					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
82	Fasilitasi kegiatan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan sekretariat TAPD					12 bulan	12 bulan				12 bulan	12 bulan				100.00	100.00		
83	Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan							20 Buku	4 dokumen laporan TP				20 Buku	4 dokumen laporan TP				100.00	100.00
84	Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator							2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen				100.00	100.00
85	Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual							2 dokumen					1 dokumen					50.00	
86	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran							81 Peserta					81 Peserta					100.00	
87	Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Raperda Dana Cadangan Pemilukada Pandeglang						1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
88	Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pemilukada							-					-						
89	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)					192 orang	113 orang	101 orang			192 orang	113 orang				100.00	100.00		
90	Manajemen SIPKD Pemda kab. Pandeglang					1 dokumen	4 dokumen laporan				1 dokumen	4 dokumen laporan				100.00	100.00		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*

91	Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan tugas pembantuan						1 dokumen					1 dokumen					100.00		
92	Bintek Penyusunan laporan keuangan SKPD dan pemerintahan daerah berbasis akrual						120 orang					120 orang					100.00		
93	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan keuangan berbasis akrual						1 SOP					1 SOP					100.00		
94	Sosialisasi nota kesepahaman antara BPK RI dan pemerintah kabupaten pandeglang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data						80 Kepala SKPD												
95	Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)								4 dokumen laporan TEPPA					1 dokumen laporan TEPPA					
96	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator								12 dokumen					6 dokumen					
97	Asistensi RKA dan RKAP-SKPD								2 kegiatan										
98	Pengendalian dan Evaluasi APBD								12 bulan					6 bulan					
99	Penyelesaian Pencatatan Investasi Non Permanen Dana Bergulir				3 laporan					3 laporan					100.00				
100	Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Layanan Unggulan DPKPA				1 dokumen					1 dokumen					100.00				
	Program Pengelolaan Aset Daerah																		
101	Penatausahaan Belanja Modal SKPD				12 bulan	2 dokumen		80 Buku/ SKPD	80 SKPD	12 bulan	2 dokumen		80 Buku/ SKPD	80 SKPD	100.00	100.00		100.00	
102	Pengamanan dan Penerliban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	
103	Pemeliharaan Kendaraan Dinas				1 tahun	1 kegiatan	50 kendaraan	13 Kendaraan dinas		1 tahun	1 kegiatan	50 kendaraan	13 Kendaraan dinas		100.00	100.00	100.00	100.00	
104	Penilaian / Kajian (KSO) Aset Daerah				tanah karang sari					1 kegiatan					100.00				
105	Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah				1 kali sosialisasi					1 kali sosialisasi					100.00				
106	Penyusunan RKBU dan RKPBU				2 dokumen	20 buku	4 Dokumen			2 dokumen	20 buku	4 Dokumen			100.00	100.00	100.00		
107	Penyusunan dan sosialisasi perda standarisasi sarana dan prasarana kerja					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
108	Penyusunan SOP TP-TGR					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
109	Penyusunan SOP Penyusunan Nilai BMD					1 dokumen					1 dokumen					100.00			

110	Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda					5 kegiatan	1 raperbup, 32 bangunan	83 bangunan/ kegiatan	Bangunan Gedung Kantor dan BMD rusak berat di 80 SKPD		2 kegiatan	1 raperbup, 32 bangunan	83 bangunan/ kegiatan	Bangunan Gedung Kantor dan BMD rusak berat di 80 SKPD		40.00	100.00	100.00	100.00
111	Pengadaan kendaraan dinas operasional (roda empat dan roda dua)					7 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua	38 unit				7 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua	38 unit				100.00	100.00		
112	Peningkatan Manajemen Asel / Barang Daerah					1 set	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 set	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		100.00	100.00	100.00	
113	Pengelolaan Tidak lanjut Perbendaharaan dan luntutan ganti rugi (TP-TGR)					1 kegiatan					1 kegiatan					100.00			
114	Penyusunan peraturan KDH tentang pedoman teknis pengelolaan TP-TGR					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
115	Penyusunan Perda tentang penyusutan nilai BMD					1 dokumen					1 dokumen					100.00			
116	Inventansir / Sensus Barang Daerah					20 buku	2 dokumen	80 Buku	1 dokumen		20 buku	2 dokumen	80 Buku			100.00	100.00	100.00	-
117	Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen				100.00	100.00	-
118	Monitoring evaluasi aset daerah kab Pandeglang						1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
119	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						1 kegiatan					1 kegiatan					100.00		
120	Bintek pengelolaan Barang Milik Daerah						1 kegiatan		80 SKPD			1 kegiatan					100.00		
121	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)							1 kegiatan	80 SKPD				1 kegiatan					100.00	-
122	Penyusunan DKBMD dan DKPBMD							2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen	1 dokumen				100.00	50.00

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten pandeglang

URAIN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN	9,304,304,263.00	9,764,892,126.00	14,150,946,873.00	24,116,660,241.38	19,694,175,290.38	9,989,894,043.00	13,977,171,353.00	19,999,777,712.00	31,282,255,636.24	18,487,922,879.00	107.37	143.14	141.33	129.71	93.88		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,304,304,263.00	9,764,892,126.00	14,150,946,873.00	24,116,660,241.38	19,694,175,290.38	9,989,894,043.00	13,977,171,353.00	19,999,777,712.00	31,282,255,636.24	18,487,922,879.00	107.37	143.14	141.33	129.71	93.88		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,380,689,540.00	6,686,912,292.00	7,563,946,873.00	8,728,656,766.00	8,774,611,966.00	6,442,033,783.00	6,824,153,885.00	7,550,463,547.00	8,886,221,784.00	8,049,312,935.00	100.96	102.05	99.82	101.81	91.73		
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6,380,689,540.00	6,686,912,292.00	7,563,946,873.00	8,728,656,766.00	8,774,611,966.00	6,442,033,783.00	6,824,153,885.00	7,550,463,547.00	8,886,221,784.00	8,049,312,935.00	100.96	102.05	99.82	101.81	91.73		
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PT. Bank Jabar Banten	6,278,742,540.00	6,425,912,292.00	7,203,642,572.00	8,217,557,665.00	8,217,557,665.00	6,278,742,540.00	6,425,912,292.00	7,203,642,572.00	8,217,557,665.00	7,533,638,013.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.68		
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD. BPR/LPK	101,947,000.00	261,000,000.00	360,304,301.00	314,356,511.00	360,304,301.00	163,291,243.00	201,491,593.00	346,820,975.00	314,356,511.00	337,712,407.00	160.17	77.20	96.26	100.00	93.73		
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-	196,742,590.00	196,750,000.00	-	196,750,000.00	-	354,307,608.00	177,962,515.00	-	-	-	180.09	90.45		
Lain-lain PAD Yang Sah	2,923,614,723.00	3,077,979,834.00	6,587,000,000.00	15,388,003,475.38	10,919,563,324.38	3,547,860,260.00	7,153,017,468.00	12,449,314,165.00	22,396,033,852.24	10,438,609,944.00	121.35	232.38	189.00	145.54	95.68		
Penerimaan Jasa Giro	2,242,614,723.00	2,677,979,834.00	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,050,000,000.00	2,985,863,082.00	5,912,048,784.00	9,297,580,881.00	4,802,495,166.00	4,819,671,080.00	133.14	220.77	185.95	120.06	235.11		
Jasa Giro Kas Daerah	2,242,614,723.00	2,677,979,834.00	5,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,050,000,000.00	2,985,863,082.00	5,912,048,784.00	9,297,580,881.00	4,802,495,166.00	4,819,671,080.00	133.14	220.77	185.95	120.06	235.11		
Pendapatan Bunga	-	-	-	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	-	-	-	13,612,136,983.00	4,027,397,259.00	-	-	-	-	67.12		
Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	-	-	-	13,612,136,983.00	4,027,397,259.00	-	-	-	-	67.12		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	681,000,000.00	400,000,000.00	700,000,000.00	2,585,525,359.38	1,984,563,324.38	561,997,178.00	1,240,968,684.00	1,957,506,336.00	830,535,993.00	49,229,365.00	82.53	310.24	279.64	32.12	2.48		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	-	-	-	-	929,461,803.50	-	-	-	-	15,229,365.00	-	-	-	-	1.64		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	681,000,000.00	400,000,000.00	700,000,000.00	2,585,525,359.38	1,055,101,520.88	561,997,178.00	1,240,968,684.00	1,957,506,336.00	830,535,993.00	34,000,000.00	82.53	310.24	279.64	32.12	3.22		
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	667,000,000.00	566,200,000.00	100,000,000.00	-	-	877,785,387.00	861,409,249.24	678,903,613.00	-	-	131.60	152.15	377.17		
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan	-	-	530,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	-	-	541,721,650.00	-	-	-	-	102.21	-	-		
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan	-	-	105,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	88,295,810.00	10,944,873.00	-	-	-	84.09	31.27	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	-	-	25,000,000 00	500,000,000 00	65,000,000 00	-	-	231,129,166 00	829,324,376.24	678,903,613 00	-	-	924 52	165 86	1,044 47		
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lainnya	-	-	7,000,000 00	21,200,000 00	35,000,000 00	-	-	16,638,681.00	21,200,000 00	-	-	-	237 70	100 00	-		
Pendapatan Dari Pengembalian	-	-	**220,000,000 00**	**2,236,278,116.00**	**705,000,000 00**	-	-	**316,441,641.00**	**2,209,396,461.00**	**863,400,627.00**	-	-	**143.84**	**102.38**	**122.47**		
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	-	-	-	1,333,423,332 00	250,000,000 00	-	-	-	1,333,423,322 00	-	-	-	-	100 00	-		
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	200,000,000 00	100,000,000 00	100,000,000 00	-	-	316,441,641 00	118,920,594 00	162,993,407 00	-	-	158 22	118 92	162 99		
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	-	10,000,000 00	3,000,000 00	3,000,000 00	-	-	-	1,050,000 00	91,610,000 00	-	-	-	35 00	3,053 67		
Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka	-	-	10,000,000 00	513,969,638 00	300,000,000 00	-	-	-	513,969,368 00	126,746,720 00	-	-	-	100 00	42 25		
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Taspen	-	-	-	6,600,000 00	2,000,000 00	-	-	-	6,600,000 00	3,300,000 00	-	-	-	100 00	165 00		
Pendapatan Dari Pengembalian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran	-	-	-	62,221,850 00	30,000,000 00	-	-	-	98,369,881 00	-	-	-	-	158.10	-		
Pendapatan Dari Pengembalian Lain-lain	-	-	-	217,063,296 00	20,000,000 00	-	-	-	217,063,296 00	478,758,500 00	-	-	-	100 00	2,393 79		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**16,919,768,400.88**	**19,298,141,013.00**	**18,448,584,177.78**	**26,781,105,673.31**	**28,096,313,302.14**	**16,696,469,352.00**	**16,710,200,501.00**	**16,256,606,525.00**	**22,381,797,356.00**	**10,662,471,131.00**	**98.68**	**86.63**	**88.13**	**83.82**	**37.95**		
Belanja Pegawai	**16,919,768,400.88**	**19,298,141,013.00**	**18,448,584,177.78**	**26,781,105,673.31**	**28,096,313,302.14**	**16,696,469,352.00**	**16,710,200,501.00**	**16,256,606,525.00**	**22,381,797,356.00**	**10,662,471,131.00**	**98.68**	**86.63**	**88.13**	**83.82**	**37.95**		
Belanja Gaji dan Tunjangan	**12,492,287,857.40**	**14,787,140,509.00**	**14,981,089,177.78**	**22,911,855,673.31**	**3,686,277,183.78**	**12,366,399,340.00**	**12,684,353,475.00**	**12,792,661,525.00**	**18,701,272,356.00**	**1,438,946,582.00**	**98.99**	**85.24**	**85.85**	**81.62**	**39.04**		
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1,830,797,000 00	2,010,261,796 00	2,298,395,384 84	3,171,293,861 05	2,791,501,772 28	1,826,934,280 00	1,879,180,838 00	2,146,516,380 00	2,473,580,640 00	1,062,054,960 00	99 79	93.48	93 39	78 00	38 76		
Tunjangan Keluarga	183,774,000.00	214,515,560 00	248,357,977 78	341,768,945 42	295,881,480 82	183,506,520 00	201,333,285 00	232,280,348 00	264,999,863 00	109,527,645 00	99 85	93 85	93 53	77 54	37 02		
Tunjangan Jabatan	212,067,000 00	215,347,800 00	204,349,376 00	267,170,390 00	216,331,375 00	211,635,000 00	191,490,000 00	195,905,000 00	209,380,000 00	94,770,000 00	99 80	88 92	95 87	78 37	43 81		
Tunjangan Fungsional Umum	109,205,000 00	109,016,000 00	115,355,552 00	144,481,662 50	126,321,000 00	109,000,000 00	100,610,000 00	107,650,000 00	115,955,000 00	50,900,000 00	99 81	92 29	93 32	80 26	40 29		
Tunjangan Beras	129,316,000 00	136,381,997 00	195,211,858 94	233,694,221 12	196,492,992 00	129,211,080 00	125,789,440 00	187,217,980 00	182,771,200 00	84,479,360 00	99 92	92 23	95 91	78.21	42 99		
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	45,998,000 00	56,571,492 00	33,265,283 79	53,381,439 45	44,697,229 67	45,360,990 00	52,987,965 00	32,645,832 00	38,880,360 00	17,196,536 00	98 62	93.67	98 14	72 83	38 47		
Pembulatan Gaji	53,000 00	45,954 00	109,617 18	65,153 77	51,336 01	51,870 00	43,282 00	69,109 00	50,136 00	18,081 00	97.87	94 19	63 05	76 95	35 22		
Iuran Asuransi Kesehatan	9,892,168,557.40	11,000,000,000 00	11,606,044,127 25	18,500,000,000 00	-	9,828,266,300.00	9,365,668,665 00	9,890,374,876 00	15,403,869,857 00	-	99 35	85 14	85 22	83 26	-		
Uang Duka Wafat/Tewas	38,909,300 00	200,000,000 00	200,000,000 00	200,000,000 00	15,000,000 00	32,433,300 00	-	-	11,785,300 00	-	83 36	-	-	5 89	-		
Uang Jasa Pengabdian	50,000,000 00	845,000,000 00	-	-	-	-	687,250,000 00	-	-	-	-	81 33	-	-	-		
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	**3,227,100,000.00**	**3,465,150,000.00**	**3,547,495,000.00**	**3,789,250,000.00**	**3,983,645,000.00**	**3,133,706,000.00**	**3,068,300,000.00**	**3,466,025,000.00**	**3,680,525,000.00**	**1,369,950,000.00**	**97.11**	**88.55**	**97.70**	**97.13**	**34.39**		
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2,975,000,000 00	3,075,800,000.00	3,075,800,000.00	3,220,375,000 00	3,284,300,000 00	2,882,050,000 00	2,726,950,000 00	3,003,725,000 00	3,158,200,000.00	1,052,950,000.00	96.88	88 66	97 66	98 07	32 06		
Tambahan Penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	252,100,000 00	389,350,000 00	471,695,000 00	568,875,000 00	699,345,000 00	251,656,000 00	341,350,000 00	462,300,000 00	522,325,000 00	317,000,000.00	99 82	87 67	98 01	91 82	45 33		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	**1,200,380,623.48**	**1,037,850,414.00**	-	-	**942,150,000.00**	**1,196,364,012.00**	**1,037,547,026.00**	-	-	-	**99.67**	**99.97**	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan					694,729,000.00						-	-	-	-	-		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	1,200,380,623 48	1,037,850,414.00	-	-	62,275,000.00	1,196,364,012 00	1,037,547,026 00	-	-	-	99.67	99 97	-	-	-		

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan					19,209,000 00						-	-	-	-	-		
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Non Migas Lainnya					165,937,000 00						-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi PNSD	-	-	-	-	**19,378,577,118.58**	-	-	-	-	**7,853,574,549.00**	-	-	-	-	**40.53**		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PNSD					15,500,000,000 00					7,853,574,549 00	-	-	-	-	50 67		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi PNSD					1,723,812,052 70						-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi PNSD					2,154,765,065 88						-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi DPRD dan KDHWKDH	-	-	-	-	**105,663,997.78**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD dan KDHWKDH					88,452,000 00						-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Bagi DPRD dan KDHWKDH					7,649,776 79						-	-	-	-	-		
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Bagi DPRD dan KDHWKDH					9,562,220 99						-	-	-	-	-		
BELANJA LANGSUNG	**11,677,228,750**	**14,624,019,810**	**15,934,558,744**	**13,748,518,755**	**16,163,191,800**	**11,189,765,084**	**12,726,241,068**	**13,846,486,547**	**10,992,578,788**	**4,652,629,370**	**95.83**	**87.62**	**86.90**	**79.95**	**28.79**		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**3,704,100,456**	**4,984,175,750**	**5,119,984,244**	**4,992,413,500**	**6,876,562,800**	**3,539,363,926**	**4,351,210,789**	**4,643,624,135**	**4,714,583,467**	**2,868,424,128**	**95.55**	**87.30**	**90.70**	**94.43**	**41.68**		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,949,600,000	2,990,400,000				2,864,954,144	2,499,897,150				97 13	83 6					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,200,000	46,800,000				39,032,000	45,950,000				104 92	98 18					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87,130,200	106,773,700				82,311,150	105,153,450				94 47	98.48					
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10,352,650	10,511,600				10,313,050	10,511,600				99 62	98 48					
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	228,610,000	920,097,860	1,280,913,400	356,737,000	270,062,800	218,197,000	891,169,700	1,142,074,950	315,534,000	149,849,250	95 45	96 86	89 16	88 45			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,063,000	11,000,000				2,118,000	8,800,000				69 15	80					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,500,000	3,000,000				-	-										
Penyediaan Makanan dan Minuman	120,000,000	120,000,000				95,270,000	79,930,000				79 39	66 61					
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	113,000,000	125,000,000	286,500,000	284,000,000	100,000,000	111,955,000	114,745,480	228,710,440	196,079,200	48,484,562	99 08	91 8	79 83	69.04			
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	26,000,000	26,000,000				14,400,000	18,000,000				55 38	69 23					
Penunjutan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan	35,752,000	23,844,700	38,406,000	57,260,000	60,000,000	34,611,300	23,838,000	20,958,000	45,518,000	14,983,000	96 81	99 97	54 57	79 49			
Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan	7,255,600	7,251,000				4,804,300	7,251,000				66 22	100					
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	32,637,000	33,466,250	43,102,444			26,785,000	30,150,750	36,448,750			82 07	90 09	84 56				
Penyediaan Bahan Bakar	52,000,000					34,612,984					66.56						
Layanan administrasi kantor			3,471,062,400	836,726,500	1,243,100,200			3,215,431,995	716,407,217	358,583,561			92 64	85 62			
Penyediaan Alat Tulis Kantor		288,330,650		217,690,000			255,235,000		201,121,500			88 52		92 39			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Digitalisasi Dokumen Arsip Pengelolaan Keuangan Daerah		271,700,000					260,577,650					95 91					

Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab Pandeglang				3,240,000,000	3,500,000,000				3,239,923,550	2,288,523,755				100			
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Tenaga Kerja Kontrak					1,703,400,000												
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**2,422,258,000**	**720,880,000**	**757,060,000**	**984,700,000**	**485,000,000**	**2,360,954,631**	**602,601,650**	**699,852,912**	**593,185,221**	**73,285,100**	**97.47**	**82.68**	**80.56**	**65.56**	**15.52**		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61,000,000	65,000,000	140,610,000	260,210,000	150,000,000	40,058,381	56,513,650	97,824,912	82,054,421	36,925,100	65 67	86 94	69 57	31 53			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,600,000	42,500,000	65,050,000	66,900,000	85,000,000	-	5,000,000	33,703,000	32,260,000	27,310,000	-	11 76	51 81	48 22			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	35,700,000	131,900,000				21,655,000	76,790,000				60 66	58 22					
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik	88,090,000	16,090,000				70,075,500	-				79 55	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	99,750,000	321,390,000	246,380,000	20,000,000		99,447,750	314,549,000	241,956,000	3,000,000		99,70	97 87	98 2	15 00			
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas		92,000,000					90,400,000										
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Roda Empat dan Roda Dua)	2,135,118,000					2,129,718,000					99 75						
Pengadaan mebelaur			-	150,000,000				-	130,530,000					87 02			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		60,000,000	235,020,000	31,970,000	250,000,000		59,349,000	226,369,000	31,020,000	11,050,000		98 92	96 32	97 03			
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan LAN			60,000,000					-					0				
Pembangunan Gudang Arsip			10,000,000	375,700,000				10,000,000	314,320,800				100	83 66			
Program peningkatan disiplin aparatur	-	**57,720,000**	**61,625,000**	-	-	-	**46,600,000**	**60,959,000**	-	-	**#DIV/0!**	**80.73**	**98.92**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
Pengadaan Seragam Dinas PNS dan Atributnya		57,720,000	61,625,000				46,600,000	60,959,000		-		80 73	98 92				
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**70,000,000**	**135,000,000**	**250,000,000**	**47,250,000**	**100,000,000**	**66,700,000**	**21,900,000**	**200,400,000**	**28,558,300**	**1,120,000**	**95.29**	**16.22**	**80.16**	**60.44**	**1.12**		
Pendidikan dan pelatihan formal	70,000,000	135,000,000	250,000,000	47,250,000	100,000,000	66,700,000	21,900,000	200,400,000	28,558,300	1,120,000	95 29	16 22	80 16	60 44			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**184,725,000**	**75,860,700**	**132,760,000**	**173,710,000**	**344,450,000**	**180,067,850**	**24,678,100**	**132,760,000**	**173,710,000**	**94,820,850**	**97.48**	**32.53**	**100.00**	**100.00**	**27.53**		
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10,000,000	7,667,600				9,385,900	7,667,600				93.86	100					
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	18,405,450	8,610,500	40,900,000	66,460,000	70,000,000	18,405,450	8,610,500	40,900,000	66,460,000	39,065,300	100	100	100	100 00			
Pengelolaan Aset SKPD	31,320,350	59,582,600	40,000,000	44,790,000	40,000,000	29,871,500	8,400,000	40,000,000	44,790,000	20,008,000	95 37	14 1	100	100 00			
Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	125,000,000				169,450,000	122,405,000				3,477,550	97 92						
Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP			51,860,000	62,460,000	65,000,000			51,860,000	62,460,000	32,270,000			100	100 00			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	**143,975,200**	**110,927,650**	**113,800,000**	**319,412,000**	**240,000,000**	**135,391,700**	**106,350,650**	**113,800,000**	**318,812,000**	**124,131,000**	**94.04**	**95.87**	**100.00**	**99.81**	**51.72**		

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	20,000,000	28,895,050	51,230,000	148,984,000	80,000,000	14,523,000	25,018,050	51,230,000	148,384,000	49,303,700	72 62	86 58	100	99 60			
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	14,900,000	16,472,600	62,570,000	170,428,000	160,000,000	14,840,000	15,772,600	62,570,000	170,428,000	74,827,900	99 6	95 75	100	100 00			
Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP	89,075,200	65,560,000				86,932,700	65,560,000				97 59	100					
Penyusunan Dokumen Rencana Strategis DPKPA	20,000,000					19,096,000					95 48						
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	**4,158,306,500**	**3,885,609,000**	**4,634,430,000**	**4,884,410,000**	**5,372,159,000**	**3,996,688,525**	**3,280,375,950**	**3,385,244,400**	**3,636,274,000**	**1,216,447,000**	**96.11**	**84.42**	**73.05**	**74.49**	**22.64**		
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	50,000,000					50,000,000					100						
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	60,000,000	76,920,000	100,000,000			53,500,000	39,750,000	94,720,000			89 17	51 68	94 72				
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	120,610,000	259,294,000	199,700,000	200,000,000	300,000,000	120,528,000	257,708,000	190,178,700	165,487,200	92,815,950	99 99	99 39	95 23	82 74			
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	47,456,500	156,500,000	120,000,000	100,000,000	120,000,000	47,436,500	146,473,000	84,697,000	87,330,000	22,458,200	99 96	93 59	100	87 33			
Peningkatan Manajemen Aset barang	1,530,606,500					1,526,350,625					99 72						
Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)	99,500,000	47,280,000	50,000,000	120,000,000	195,175,000	98,800,000	43,970,000	49,000,000	119,236,000	73,956,000	99 3	93	98	99 36			
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan persemesteran	99,878,000	131,905,000	113,700,000			99,843,000	112,846,000	97,670,400			99 96	85 55	85 9				
Pelayanan Pengelolaan Gaji	70,000,000	67,000,000	80,000,000	70,000,000	123,250,000	68,130,000	65,955,000	56,714,400	61,635,000	48,473,750	97 33	98 44	70 89	88 05			
Kegiatan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD	116,000,000	60,770,000	82,000,000			108,528,500	53,805,000	53,060,600		32,636,000	93 56	88 21	64 71				
Asistensi penyusunan SPT/restitusi PPh 21	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		53,295,000	-	97,415,000	-			0	97 42	0 00			
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian				215,790,000					185,397,500					85 92			
Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah				45,000,000	76,790,000				45,000,000					100 00			
Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD	86,128,600	93,481,000	133,544,000	140,000,000	200,000,000	86,128,600	90,832,500	113,319,200	127,843,000	56,981,100	100	97 17	84 86	91 32			
Penyusunan Pengabaran APBD dan Pengabaran Perubahan APBD			310,281,000	272,750,000	312,500,000			254,930,000	226,506,000	75,980,000	77 48		82 16	83.05			
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	42,250,000	210,040,000	97,040,000	450,000,000	404,500,000	41,800,000	191,639,000	58,192,800	352,207,600	75,897,300	98 93	91,24	59.97	78.27			
Kegiatan Pendampingan SIPKD	245,161,600	234,725,000				242,084,500	224,957,000				98 74	95 84					
Manajemen dan Pendampingan SIPKD				380,870,000	183,560,000				237,770,000	77,179,900		95 84		62.43			
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	60,000,000					60,000,000					100						
Pembinaan Bendahara SKPD	100,000,000	87,010,000	100,000,000	240,000,000	300,000,000	86,100,000	72,610,000	77,100,000	227,943,000	84,066,200	86 1	83 45	77 1	94.98			
Bintek Bendahara SKPD	77,575,300					68,345,300					88 1						
Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD	108,840,000	137,615,000	274,900,000	249,900,000	249,900,000	105,042,500	99,400,000	146,700,000	153,300,000	-	96 51	72.23	53.36	61.34			
Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD	88,800,000	93,000,000	126,270,000	188,000,000	123,810,000	88,800,000	79,981,000	124,705,000	83,260,000	26,775,000		85 01	98 41	44.29			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan APBD	120,000,000	121,000,000	144,255,000	283,250,000	263,810,000	120,000,000	79,981,000	48,691,000	134,850,000	184,038,000		66 1	33 75	47.61			
Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah	-	91,190,000	150,000,000	255,000,000	306,660,000		80,795,000	127,350,000	243,222,000	88,201,250		88.6	84 9	95.38			

Biaya Operasional Kegiatan PPKD	-	18,104,000	20,000,000	20,000,000	134,700,000		16,284,000	18,260,000	19,750,000	15,131,000		89.95	91.3	98.75			
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah		111,000,000	120,000,000	96,000,000	100,800,000		83,250,000	112,210,000	77,500,000	18,450,000		75	93.51	80.73			
Pengendalian dan pembinaan pelaksanaan anggaran		48,250,000	52,500,000				48,250,000	42,905,000				100	81.72				
Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD			53,000,000	60,000,000				52,640,000	60,000,000				99.32	100.00			
Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD			53,000,000	60,000,000	150,000,000			45,560,000	52,185,000				85.96	86.98			
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional SKPD			101,430,000	99,960,000	80,000,000			75,270,000	58,830,000	20,325,500			74.21	58.85			
Supervisi Pelaksanaan Pengakuntansian SKPD			55,000,000	50,000,000	70,000,000			31,978,700	28,156,000				58.14	56.31			
Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)			150,000,000	143,000,000	300,000,000			146,263,600	125,130,000				39.09	87.50			
Penyusunan APBD dan perubahan APBD			479,999,000	540,670,000	395,574,000			431,376,000	314,348,000	33,134,750			89.89	58.14			
Penyusunan APBD	215,000,000	321,822,500				193,200,000	239,940,000				89.86	74.56					
Penyusunan Penjabaran APBD	135,000,000	147,000,000				104,600,000	127,245,000				77.48	86.56					
Penyusunan Perubahan APBD	200,000,000	174,225,000				198,586,000	166,075,000				99.29	95.32					
Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD	135,000,000	119,965,000				133,350,000	114,065,000				98.78	95.08					
Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	25,500,000	266,766,000				24,100,000	265,976,000				94.51	99.7					
Penyusunan Raperbup tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten pandeglang		110,000,000					109,181,150					99.26					
Penyusunan Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah kabupaten pandeglang		119,650,300					111,895,300					93.52					
Fasilitasi kegiatan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan sekretariat TAPD		253,332,000	163,800,000				138,490,000	114,963,000				54.67	70.18				
Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan				36,860,000	41,960,000				27,680,000	5,588,700				75.09			
Pengakuntansian PPKD dan Pengakuntansian Konsolidator				120,500,000	164,720,000				97,250,000	53,675,800				80.71			
Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual				140,000,000					125,123,000					89.37			
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran				202,000,000					201,335,500					99.67			
Penyusunan Dokumen Naskah Akademik Raperda Dana Cadangan Pemilukada Pandeglang			80,000,000					60,505,000									
Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pemilukada				-					-				75.63	#DIV/0!			
Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		100,000,000	193,115,000	104,860,000			95,283,000	118,925,800	-			95.28	61.58	0.00			
Manajemen SIPKD Pemda kab. Pandeglang		127,765,000	455,000,000				123,940,000	164,968,200				97.01	81.72				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian dan tugas pembantuan			75,000,000					29,319,500					39.09				
Bintek Penyusunan laporan keuangan SKPD dan pemerintahan daerah berbasis akrual			304,935,000					249,355,500					81.77				

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan keuangan berbasis akrual			40,500,000					16,300,000					40.25				
Sosialisasi nota kesepahaman antara BPK RI dan pemerintah kabupaten pandeglang tentang pengambangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data			55,560,000														
Operasional Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)					87,640,000					17,217,000							
Penyusunan Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator					207,000,000					58,700,600							
Asistensi RKA dan RKAP-SKPD					329,810,000					6,750,000							
Pengendalian dan Evaluasi APBD					150,000,000					48,015,000							
Penyelesaian Pencatatan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	150,000,000					150,000,000											
Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Layanan Unggulan DPKPA	75,000,000					68,140,000											
Program Pengelolaan Aset Daerah	**993,862,800**	**4,645,845,900**	**4,064,890,500**	**2,426,543,255**	**2,745,000,000**	**910,598,450**	**4,292,523,929**	**4,699,846,100**	**1,325,455,800**	**200,400,692**	**91.62**	**92.39**	**96.61**	**62.87**	**10.21**		
Penatausahaan Belanja Modal SKPD	30,800,000	79,999,950		50,000,000	150,000,000	26,360,000	46,300,000		49,830,000	38,919,000		57.88		99.66			
Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang	144,844,000	450,000,000	460,270,500	859,553,255	900,000,000	98,923,900	346,101,429	452,242,500	180,381,800	28,599,400		79.91	98.26	20.99			
Pemeliharaan Kendaraan Dinas	519,688,300	800,000,000	400,000,000	200,000,000		516,013,050	791,300,000	392,915,000	97,775,000			98.91	98.23	48.89			
Penilaian / Kajian (KSO) Aset Daerah	90,679,500					90,533,500											
Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah	147,825,000					147,825,000											
Penyusunan RIKBU dan RKPBU	60,026,000	79,995,000	35,000,000			30,943,000	75,717,500	34,990,000				94.65	99.97				
Penyusunan dan sosialisasi perda standardisasi sarana dan prasarana kerja		73,945,000					67,620,000					91.45					
Penyusunan SOP TP-TGR		73,945,000					67,295,000					93.89					
Penyusunan SOP Penyusunan Nilai BMD		173,337,000					162,753,000										
Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda		150,000,000	430,380,000	450,000,000	495,000,000		73,571,000	416,879,000	390,431,000	77,584,000		49.05	96.86	86.76			
Pengadaan kendaraan dinas operasional (roda empat dan roda due)		1,659,920,000	2,384,000,000				1,618,395,000	2,352,779,000				97.5	98.69				
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah		350,000,000	210,845,000	120,000,000	400,000,000		338,745,000	157,957,000	88,088,000	18,132,292		96.78	74.92	73.41			
Pengelolaan Tidak lanjut Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR)		99,999,000					88,906,000			-		88.91					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Penyusunan peraturan KDH tentang pedoman teknis pengelolaan TP-TGR		37,160,000					29,702,500					79.93					
Penyusunan Perda tentang penyusutan nilai BMD		99,990,000					82,192,500					82.2					

Inventarisir / Sensus Barang Daerah		517,554,950	365,000,000	400,000,000	400,000,000		503,925,000	363,110,500	388,211,700			97 37	99 48	97 05			
Penyusunan Neraca Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang			50,000,000	50,000,000	100,000,000			46,629,800	49,268,000	94,804,000			93 26	98.54			
Monitoring evaluasi aset daerah lub Pandeglang			177,895,000					171,608,300					96 47				
Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			151,500,000					149,985,000					99				
Bintek pengelolaan Barang Milik Daerah			200,000,000		100,000,000			160,750,000					80 38				
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)				157,690,000	100,000,000				148,209,500					93.99			
Penyusunan DKBMD dan DKPBMD				139,300,000	100,000,000				133,260,000	22,562,000				95.66			

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BPKD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD Kabupaten Pandeglang

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, selain menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang juga menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai satuan kerja perangkat daerah, yaitu :

a) Penyusunan perencanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
b) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
c) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
d) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan;
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum Optimal Pengelolaan Keuangan	Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Belum Optimal	Perencanaan awal belum terakomodir dalam penggangaran.
		Kualitas Penyajian Laporan Keuangan OPD Perlu Ditingkatkan	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai penyusunan Laporan keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah belum optimal
		Pelayanan perbendaharaan belum optimal	Proses penatausahaan masih manual dan tidak efektif
2	Belum optimal Pengelolaan Barang Milik Daerah	Database BMD masih perlu ditingkatkan baik validitas maupun kelengkapan dokumen pendukung	Masih terdapat perbedaan pada beberapa jenis BMD antara kondisi dilapangan dengan catatan database
		Pengamanan BMD perlu ditingkatkan	1. Masih banyak tanah milik Daerah yang belum bersertifikat, diberikan tanda batas yang jelas dan permanen dan belum semua dipasang plang milik Pemerintah Daerah 2. BPKB Kendaraan Dinas/Operasional tidak ada bukti fisik 3. Semua Gedung belum memiliki IMB
		Pemanfaatan BMD perlu dioptimalkan	Masih banyak aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang belum dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : " **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**"

Adapun Misinya adalah :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah;

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program tahun 2021 - 2026, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari pencermatan terhadap visi, misi dan program kerja bupati dan Wakil bupati memberikan gambaran peran serta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

   Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 2 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: **Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat**

Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai) dan Indeks Evaluasi SPBE

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Dengan Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)

b. Pernyataan misi ke 4 : **Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah**

Pada misi ini, peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah

Dengan Indikator : Indeks Daya Saing Daerah (nilai)

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Dengan Indikator : Laju Peningkatan PAD (%)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.

Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan
5. Transformasi Ekonomi.

- **Faktor Penghambat dan Pendorong Rencana Strategis**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Kementerian Keuangan

dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

a) **Faktor Penghambat**

A. Pengelolaan Fiskal

1. Ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan.
2. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnasi, konstelasi dan dinamika politik global.
3. Isu non-ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi (global warming, ageing population, keterbatasan energi, dan deforestasi).
4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

B. Penerimaan Negara

1. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
2. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBP masih rendah.
3. Free Trade Agreements (FTAs) berpotensi menurunkan penerimaan.
4. Ketergantungan PNBP dari SDA migas maupun SDA non-migas pada realisasi cost recovery harga komoditi tambang di pasar internasional.
5. Regulasi yang komprehensif terkait pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik belum selesai disusun seluruhnya.
6. Basis data transaksi digital yang memadai belum tersedia.
7. Adanya permasalahan dari faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya realisasi penerimaan negara.
8. Perlambatan kegiatan ekspor impor maupun menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang yang dikenakan cukai karena pandemi Covid-19.

C. Belanja Negara

1. Masih terdapat indikasi inefisiensi pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah.

2. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) belum optimal.
3. Prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.
4. Pelaporan pertanggungjawaban atas belanja daerah yang belum terstandar.
5. Sinergi belanja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian program prioritas nasional perlu ditingkatkan.

D. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

1. Kualitas pelaksanaan anggaran K/L masih rendah.
2. Kesadaran (awareness) pengelola BMN pada beberapa K/L yang masih rendah.
3. Masih terdapat permasalahan administrasi BMN pada K/L.
4. Mitigasi risiko kerugian pada aset pemerintah yang disebabkan adanya bencana/force majeure belum diterapkan menyeluruh pada semua Kementerian/Lembaga.
5. Risiko sudden reversal dan crowding-out.
6. Rata-rata tingkat bunga utang cenderung semakin meningkat.
7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.
8. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (multi years) dan merupakan collaborative work dari banyak pihak yang terkait.

E. Birokrasi dan Layanan Publik

1. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal.
2. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat.
3. Praktik KKN atau irregularities yang masih terjadi.
4. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif.
5. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal
6. Kemenkeu Corporate University belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan.

b) **Faktor Pendukung**

A. Pengelolaan Fiskal

1. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi.
2. Meningkatnya peran teknologi digital (fintech) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat.Penerimaan Negara
4. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
5. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBP masih rendah.

B. Penerimaan Negara

1. Perluasan subyek dan obyek penerimaan negara (pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP).
2. Kemudahan akses dan pertukaran data.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.
4. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019.

C. Belanja Negara

1. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang semakin meningkat.
3. Berkembangnya prinsip new thinking of working pada institusi pemerintah pusat dan daerah.
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran pada K/L maupun pada pemerintah daerah.
5. Peningkatan peran belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bertambahnya alokasi belanja K/L.
6. Awareness dan pemahaman pengelola keuangan K/L terkait prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran semakin meningkat.
7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi. Pandemi

Covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.

8. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (multi years) dan merupakan collaborative work dari banyak pihak yang terkait.

D. Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

1. Implementasi The Integrated Financial Management Information System (IFMIS) serta integrasi database keuangan untuk mendukung business intelligence pemerintah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh K/L semakin meningkat.
3. Penyederhanaan serta penajaman proses bisnis pengelolaan keuangan negara dan daerah yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi.
4. Peran penting investasi pada BUMN (PMN), BLU, dan Pemda/BUMD sebagai alat fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil pengelolaan BMN yang meningkat sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan eksposur APBN (cost saving).
6. Pasar keuangan yang cukup besar baik domestik maupun internasional.
7. Peran strategis BLU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Semakin berkembangnya instrumen pembiayaan non-APBN.

E. Birokrasi dan Layanan Publik

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital Kementerian Keuangan.
3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan penggunaan Audit Management System (AMS TeamMate) yang terintegrasi.
5. Telah diterapkannya enterprise risk management (ERM) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.
6. Penerapan Three Lines of Defense di Kemenkeu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.
7. Infrastruktur pembelajaran yang modern baik fisik maupun nonfisik.

8. Kementerian Keuangan menuju Functional-based organization (kaya jabatan fungsional).
9. Kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara untuk KLID semakin besar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan letak/posisinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai SKPD yang melakukan pelayanan umum bidang Pendapatan, bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berada di posisi strategis yakni di pusat kota Pandeglang, sehingga proses pelayanan dapat terjangkau dengan mudah dan ditunjang dengan lingkungan perkantoran memadai dari halaman yang cukup hidup dan akses parkir yang luas, ditambah dengan tata ruang perbidang yang ada cukup nyaman untuk melayani SKPD. Sehingga ditinjau dari rencana tata ruang wilayah dan kajian hidup strategis sangatlah baik dalam menunjang pelayanan umum bidang pendapatan, bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan berbagai permasalahan pelayanan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperoleh gambaran/ informasi tentang berbagai isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada tolok ukur tersebut di atas, diperoleh beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, yaitu :

1) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
2) Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik;
3) Peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
4) Pembinaan dan Koordinasi dengan SKPD dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
5) Integrasi database BMD dengan perencanaan dan penganggran, pentausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
6) Peningkatan Pengamanan dan Penertiban BMD
7) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemanfaatan BMD.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 .

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : " **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA".** Adapun Misi yang sesuai dengan TUPOKSI BPKD adalah Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan misi ke -4 yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah.

Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan agar dapat memberikan arah yang lebih focus terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis yang jelas, diharapkan setiap bidang yang ada di BPKD Kabupaten Pandeglang dalam menyusun rencana kegiatannya dapat lebih terarah dan terpadu.

Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKD

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

   Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKD

Dengan Indikator :Nilai SAKIP BPKD.

2. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

   Sasaran : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

   Dengan Indikator : Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)

3. Tujuan : Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu

   Sasaran : Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P

   Dengan Indikator : Tersusunnya RAPBD secara tepat waktu.

4. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel.

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah

   Sasaran : pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif

   Dengan Indikator : Penatausahaan keuangan sesuai prosedur.

5. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan taat asas

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Adanya kesesuaian antara pencatatan data aset dan fisik

   Sasaran : Tertib dalam administrasi, fisik, dan legal

   dengan Indikator : Persentase aset yang tertib dalam administrasi, fisik, dan legal

6. Tujuan : Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator : Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Sasaran : Potensi asset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung PAD

   dengan Indikator : Persentase aset yang berpotensi untuk dimanfaatkan yang belum dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaaa n, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD	Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	30%	50%	70%	90%	100%	100%
			Persentase Validitas Neraca Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPKD Kab. Pandeglang

Visi : PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaaan, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Menciptakan tata kelola professional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah 2. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi 3. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi 4. Meningkatkan kualitas SDM 5. Meningkatkan koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif, cepat dan tepat 6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD – Badan Anggaran 7. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien 2. Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima 3. Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan OPD terkait 4. Meningkatkan kompetensi aparatur 5. Meningkatkan validitas laporan keuangan 6. Peningkatan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penyusunan anggaran 7. Mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Melakukan Identifikasi dan Verifikasi BMD yang dapat dimanfaatkan 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi pemanfaatan BMD kepada OPD 3. Menyusun Perencanaan Pemanfaatan Aset yang berpotensi menghasilkan PAD 4. Melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap aset yng sudah dimanfaatkan 5. Melakukan koordinasi dengan OPD pengelola aset yang dimanfaatkan 6. Melengkapi legal dokumen kepemilikan 7. Membangun jaringan dengan pihak pihak terkait 8. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan aset 9. Melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 10. Meningkatkan promosi PAD Potensial 11. Pelaksanaan Pemanfaatan Aset yang menghasilkan PAD	1. Penelusuran Potensi PAD 2. Reformulasi dan Implementasi Target PAD berbasis Potensi 3. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana sumber sumber PAD potensial 4. Peningkatan Sumber Sumber Potensi PAD Secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi 5. Peningkatan Kinerja Pencapaian Target PAD melalui penekanan Loss of Income dan High cost economy, optimalisasi bebasis kajian dan peninjauan kontrak kontrak PAD Potensial 6. Peningkatan Kinerja Pencapaian Target PAD melalui peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber sumber PAD 7. Pemantapan Kinerja Pencapaian Target PAD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 perlu dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program dan kegiatan prioritas, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang dalam lima tahun mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang dalam mendukung berbagai prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang antara lain melaksanakan perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, pengelolaan anggaran kas daerah, penyediaan sumber daya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang handal serta penertiban arsip pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Keuangan						100%	458,734,598,828	100%	47,721,230,500	100%	57,035,437,313	100%	59,887,209,179	100%	62.881.569.638	100%	66,025,648,120	BPKD	
Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		100%	48.683.620.148	100%	48.333.300.000	100%	49.281.011.000	100%	50.228.723.000	100%	55.993.686.904	100%	58.793.371.249	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah		100%	247.280.800	100%	255.000.000	100%	270.000.000	100%	290.000.000	100%	320.000.000	100%	248.790.792	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		8 Dok	55,460,800	7 Dok	30.000.000	7 Dok	58,233,840	7 Dok	61,145,532	7 Dok	64.202.809	7 Dok	67.412.949.03	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	13,190.000	1 Dok	5,000.000	1 Dok	13,849,500	1 Dok	14,541,975	1 Dok	15.269.074	1 Dok	16.032 527.44	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	13,190.000	1 Dok	5,000.000	1 Dok	13,849,500	1 Dok	14,541,975	1 Dok	15.269.074	1 Dok	16.032 527.44	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD		1 Dok	14.690.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	15.424.500	1 Dok	16.195.725	1 Dok	17.005.511	1 Dok	17.855.786.81	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	14.690.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	15.424.500	1 Dok	16.195.725	1 Dok	17.005.511	1 Dok	17.855.786.81	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dok	50.780.000	6 Dok	30.000.000	6 Dok	53.319.000	6 Dok	55.984.950	6 Dok	58.784.198	6 Dok	61.723.407.38	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24 Dok	42.680.000	24 Dok	20.000.000	24 Dok	44.814.000	24 Dok	47.054.700	24 Dok	49.407.435	24 Dok	51.877.806.75	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**44.655.436.361**	**100%**	**44.750.000.000**	**100%**	**45.000.000.000**	**100%**	**45.250.000.000**	**100%**	**45.500.000.000**	**100%**	**56,019.301.801**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan SKPD		66 Orang	45,937,368,228	66 Orang	45,997,400,500	66 Orang	48,234,236,639	66 Orang	50,645,948,471	66 Orang	53,178,245,895	66 Orang	55,837,158,189.69	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanannya Penatausaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dok	45.000.000	12 Dok	17.930.000	12 Dok	47.250.000	12 Dok	49.612.500	12 Dok	52.093.125	12 Dok	54.697.781.25	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Keuangan SKPD		36 Dok	32.000.000	36 Dok	14.100.000	36 Dok	33.600.000	36 Dok	35.280.000	36 Dok	37.044.000	36 Dok	38.896.200.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Dok	9.000.000	2 Dok	4.740.000	2 Dok	9.450.000	2 Dok	9.922.500	2 Dok	10.418.625	2 Dok	10.939.556.25	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD		17 Dok	63.850.000	17 Dok	27.260.000	17 Dok	67.042.500	17 Dok	70.394.625	17 Dok	73.914.356	17 Dok	77.610.074.06	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**100%**	**108,800,000**	**100%**	**35,970,000**	**100%**	**114,240,000**	**100%**	**119,952,000**	**100%**	**125,949,600**	**100%**	**132,247,080**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya RKBMD/RKP BMD dan RKBMD/RKP BMD Perubahan		4 Dok	4,500,000	4 Dok	1,720,000	4 Dok	4,725,000	4 Dok	4,961,250	4 Dok	5,209,313	4 Dok	5,469,778.13	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi BMD dan Laporan BMD SKPD		39 Dok	40,600,000	39 Dok	18,250,000	39 Dok	42,630,000	39 Dok	44,761,500	39 Dok	46,999,575	39 Dok	49,349,553.75	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD SKPD		24 Dok	63,700,000	24 Dok	16,000,000	24 Dok	66,885,000	24 Dok	70,229,250	24 Dok	73,740,713	24 Dok	77,427,748.13	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**-**	**100%**	**212,500,000**	**100%**	**223,125,000**	**100%**	**234,281,250**	**100%**	**245,995,313**	**100%**	**258,295,078**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	-	97 Unit	25,000,000	97 Unit	26,250,000	97 Unit	27,562,500	97 Unit	28,940,625	97 Unit	30,387,656.25	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-	12 Dok	20,000,000	12 Dok	21,000,000	12 Dok	22,050,000	12 Dok	23,152,500	12 Dok	24,310,125.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	16 Dok	17,500,000	16 Dok	18,375,000	16 Dok	19,293,750	16 Dok	20,258,438	16 Dok	21,271,359.38	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	24 Dok	20,000,000	24 Dok	21,000,000	24 Dok	22,050,000	24 Dok	23,152,500	24 Dok	24,310,125.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	52,500,000	1 Tahun	55,125,000	1 Tahun	57,881,250	1 Tahun	60,775,312.50	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaraan ya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	84,000,000	1 Tahun	88,200,000	1 Tahun	92,610,000	1 Tahun	97,240,500.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**578,998,128**	**100%**	**255,000,000**	**100%**	**607,948,026**	**100%**	**638,345,427**	**100%**	**670,262,699**	**100%**	**10,939,556**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun	24,561,000	-	-	1 Tahun	25,789,050	1 Tahun	27,078,502.50	1 Tahun	28,432,428	1 Tahun	29,854,049.01	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	303,967,400	1 Tahun	255,000,000	1 Tahun	319,165,770	1 Tahun	335,124,058.50	1 Tahun	351,880,261	1 Tahun	369,474,274.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		19 Item	72,719,720	-	-	19 Item	76,355,706	19 Item	80,173,491.30	19 Item	84,182,166	19 Item	88,391,274.16	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	50,350,000	-	-	12 Bulan	52,867,500	12 Bulan	55,510,875.00	12 Bulan	58,286,419	12 Bulan	61,200,739.69	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	118,400,000	-	-	1 Tahun	124,320,000	1 Tahun	130,536,000.00	1 Tahun	137,062,800	1 Tahun	143,915,940.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Tahun	9,000,000	-	-	1 Tahun	9,450,000	1 Tahun	9,922,500.00	1 Tahun	10,418,625	1 Tahun	10,939,556.25	BPKD	Pandeglang
		5.02.01.2.0 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**8,500,000**	**100%**	**60,830,000**	**100%**	**63,871,500**	**100%**	**67,065,075**	**100%**	**70,418,329**	**100%**	**73,939,245**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		2 Unit	8,500,000	8 Unit	60,830,000	8 Unit	63,871,500	8 Unit	67,065,075	8 Unit	70,418,329	8 Unit	73,939,245.19	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat kualitas kinerja Perangkat Daerah (Nilai SAKIP)**		**100%**	**975,426,000**	**100%**	**413,500,000**	**100%**	**1,024,197,300**	**100%**	**1,075,407,165**	**100%**	**1,129,177,523**	**100%**	**1,185,636,399**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	13,250,000	-	-	1 Tahun	13,912,500	1 Tahun	14,608,125	1 Tahun	15,338,531	1 Tahun	16,105,457.81	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	455,220,000	1 Tahun	370,000,000	1 Tahun	477,981,000	1 Tahun	501,880,050	1 Tahun	526,974,053	1 Tahun	553,322,755.13	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	37,830,000	-	-	1 Tahun	39,721,500	1 Tahun	41,707,575	1 Tahun	43,792,954	1 Tahun	45,982,601.44	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Tahun	469,126,000	1 Tahun	43,500,000	1 Tahun	492,582,300	1 Tahun	517,211,415	1 Tahun	543,071,986	1 Tahun	570,225,585.04	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**719,997,000**	**100%**	**265,000,000**	**100%**	**755,996,850**	**100%**	**793,796,693**	**100%**	**833,486,527**	**100%**	**875,160,853**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Tahun	591,672,000	1 Tahun	265,000,000	1 Tahun	621,255,600	1 Tahun	652,318,380	1 Tahun	684,934,299	1 Tahun	719,181,013.95	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Tahun	128,325,000	-	-	1 Tahun	134,741,250	1 Tahun	141,478,313	1 Tahun	148,552,228	1 Tahun	155,979,839.53	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**100%**	**408,420,692,930**	**100%**		**100%**	**4,407,612,647**	**100%**	**4,627,993,279**	**100%**	**4,859,392,943**	**100%**	**5,102,362,590**	**BPKD**	**Pandeglang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**100%**	**1,879,000,000**	**100%**		**100%**	**1,972,950,000**	**100%**	**2,071,597,500**	**100%**	2,175,177,375	**100%**	2,283,936,244	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS		2 Dok	156,000,000	2 Dok	45,000,000	2 Dok	163,800,000	2 Dok	171,990,000	2 Dok	180,589,500	2 Dok	189,618,975.00	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dok	130,000,000	2 Dok	45,000,000	2 Dok	136,500,000	2 Dok	143,325,000	2 Dok	150,491,250	2 Dok	158,015,812.50	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		70 Dok 1 Keg	136,700,000	70 Dok 1 Keg	30,250,000	70 Dok 1 Keg	143,535,000	70 Dok 1 Keg	150,711,750	70 Dok 1 Keg	158,247,338	70 Dok 1 Keg	166,159,704.38	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		69 Dok 1 Keg	134,000,000	69 Dok 1 Keg	30,250,000	69 Dok 1 Keg	140,700,000	69 Dok 1 Keg	147,735,000	69 Dok 1 Keg	155,121,750	69 Dok 1 Keg	162,877,837.50	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		68 Dok	97,350,000	68 Dok	39,000,000	68 Dok	102,217,500	68 Dok	107,328,375	68 Dok	112,694,794	68 Dok	118,329,533.44	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		68 Dok	97,350,000	68 Dok	39,000,000	68 Dok	102,217,500	68 Dok	107,328,375	68 Dok	112,694,794	68 Dok	118,329,533.44	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		3 Dok	329,800,000	3 Dok	66,700,000	3 Dok	346,290,000	3 Dok	363,604,500	3 Dok	381,784,725	3 Dok	400,873,961.25	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		3 Dok	397,800,000	3 Dok	69,700,000	3 Dok	417,690,000	3 Dok	438,574,500	3 Dok	460,503,225	3 Dok	483,528,386.25	**BPKD**	**Pandeglang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.0 1.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		20 Dok	400,000,000	20 Dok	63,400,000	20 Dok	420,000,000	20 Dok	441,000,000	20 Dok	463,050,000	20 Dok	486,202,500.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 1.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		-	-	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	21,000,000	1 Tahun	22,050,000	1 Tahun	23,152,500	1 Tahun	24,310,125.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 1.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		-	-	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	26,250,000	1 Tahun	27,562,500	1 Tahun	28,940,625	1 Tahun	30,387,656.25	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 1.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		-	-	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	15,750,000	1 Tahun	16,537,500	1 Tahun	17,364,375	1 Tahun	18,232,593.75	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 1.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		-	-	1 Tahun	57,700,000	1 Tahun	60,585,000	1 Tahun	63,614,250	1 Tahun	66,794,963	1 Tahun	70,134,710.63	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**100%**	**763,717,130**	**100%**	**404,000,000**	**100%**	**801,902,987**	**100%**	**841,998,136**	**100%**	**884,098,043**	**100%**	**928,302,945**	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 2.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Kas Daerah		12 Dok 12 Laporan 1 Keg	39,508,000	12 Dok 12 Laporan 1 Keg	40,000,000	12 Dok 12 Laporan 1 Keg	41,483,400	12 Dok 12 Laporan 1 Keg	43,557,570	12 Dok 12 Laporan 1 Keg	45,735,449	12 Dok 12 Laporan 1 Keg	48,022,220.93	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 2.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Asistensi Angkas Tahun Anggaran Asistensi Angkas Perubahan Tahun Anggaran Penerbitan SPD dokumen Evaluasi Anggaran Kas Per Triwulan		10 Dok	44,486,000	10 Dok	40,000,000	10 Dok	46,710,300	10 Dok	49,045,815	10 Dok	51,498,106	10 Dok	54,073,011.04	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5 02 02 2 0 2 05	Koordinasi, Fasilitasi, Assistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Realisasi Dana Transfer Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Laporan Realisasi DAK Fisik Realisasi DAK Non Fisik		11 Dok 7 Keg	168,050,000	11 Dok 7 Keg	50,000,000	11 Dok 7 Keg	176,452,500	11 Dok 7 Keg	185,275,125	11 Dok 7 Keg	194,538,881	11 Dok 7 Keg	204,265,825.31	BPKD	Pandeglang
		5 02 02 2 0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Arus Kas Realisasi Penerimaan dan Belanja Daer Pemungutan PFK Rekonsaliasi Pajak Per Triwulan (DHI)		40 Dok	56,644,000	40 Dok	35,000,000	40 Dok	59,476,200	40 Dok	62,450,010	40 Dok	65,572,511	40 Dok	68,851,136.03	BPKD	Pandeglang
		5 02 02 2 0 2 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja. Berita Acara Rekon Saldo Kas dan evaluasi SPJ Fungsional OPD.		12 Dok 1 Keg	209,709,130	12 Dok 1 Keg	100,000,000	12 Dok 1 Keg	220,194,587	12 Dok 1 Keg	231,204,316	12 Dok 1 Keg	242,764,532	12 Dok 1 Keg	254,902,758.20	BPKD	Pandeglang
		5 02 02 2 0 2 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Juknis Penatausahaan Keuangan. Sosialisasi Juknis Penerbitan SPB BOS Penerbitan Sp2B JKN/KTP BLUD pengelolaan Ontspan Dana Desa Pembuaan Penatausahaan		5 Dok 2 Keg	65,320,000	5 Dok 2 Keg	75,000,000	5 Dok 2 Keg	68,586,000	5 Dok 2 Keg	72,015,300	5 Dok 2 Keg	75,616,065	5 Dok 2 Keg	79,396,868.25	BPKD	Pandeglang
		5 02 02 2 0 2 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	189,000,000	1 Tahun	198,450,000	1 Tahun	208,372,500	1 Tahun	218,791,125.00	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**100%**	**1,135,960,000**	**100%**	**551,770,000**	**100%**	**1,276,758,000**	**100%**	**1,340,595,900**	**100%**	1,407,625,695	**100%**	1,478,006,980	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		52 Dok	59,550,000	2 Dok	21,770,000	2 Dok	62,527,500	2 Dok	65,653,875	2 Dok	68,936,569	2 Dok	72,383,397.19	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersusunnya Dokumen Laporan Kegiatan Rekonsiliasi Transaksi keuangan bulanan dan Laporan hasil supervisi		12 Dok 4 Keg	103,264,900	12 Dok 4 Keg	50,000,000	12 Dok 4 Keg	108,427,200	12 Dok 4 Keg	113,848,560	12 Dok 4 Keg	119,540,988	12 Dok 4 Keg	125,518,037.40	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda		59 Dok	563,870,000	77 Dok	200,000,000	77 Dok	592,063,500	77 Dok	621,666,675	77 Dok	652,750,009	77 Dok	685,387,509.19	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Raperda dan Raperbub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		4 Dok	180,676,000	2 Dok	120,000,000	2 Dok	189,709,800	2 Dok	199,195,290	2 Dok	209,155,055	2 Dok	219,612,807.23	**BPKD**	**Pandeglang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.0 3.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		-	-	1 Dok	30,000,000	1 Dok	31,500,000	1 Dok	33,075,000	1 Dok	34,728,750	1 Dok	36,465,187.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 3.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tersusunnya Dokumen Majelis TP-TGR		1 Dok	48,600,000	4 Dok	50,000,000	4 Dok	51,030,000	4 Dok	53,581,500	4 Dok	56,260,575	4 Dok	59,073,603.75	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 3.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		-	-	6 Dok	50,000,000	6 Dok	52,500,000	6 Dok	55,125,000	6 Dok	57,881,250	6 Dok	60,775,312.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Tahun	180,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	189,000,000	1 Tahun	198,450,000	1 Tahun	208,372,500	1 Tahun	218,791,125.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.0 4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**100%**	**404,302,966,600**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.0 4.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				391,299,568,600											**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.02.2.0 4.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5,500,000,000											**BPKD**	**Pandeglang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				7,503,398,000											BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**100%**	**339,849,200**	**100%**	**76,000,000**	**100%**	**356,001,660**	**100%**	**373,801,743**	**100%**	**392,491,830**	**100%**	**412,116,422**	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan DaerahPenerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		12 Dok	50,000,000	12 Dok	10,000,000	12 Dok	52,500,000	12 Dok	55,125,000	12 Dok	57,881,250	12 Dok	60,775,312.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		1 Aplikasi	132,049,200	2 Aplikasi	56,000,000	1 Aplikasi	138,651,660	1 Aplikasi	145,584,243	1 Aplikasi	152,863,455	1 Aplikasi	160,506,627.91	BPKD	Pandeglang
		5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		20 Orang	157,000,000	1 Keg	10,000,000	1 Keg	164,850,000	1 Keg	173,092,500	1 Keg	181,747,125	1 Keg	190,834,481.25	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah	**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**1,630,285,750**	**100%**	**572,000,000**	**100%**	**1,839,900,038**	**100%**	**1,931,895,039**	**100%**	**2,028,489,791**	**100%**	**2,129,914,281**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**1,630,285,750**	**100%**	**572,000,000**	**100%**	**1,839,900,038**	**100%**	**1,931,895,039**	**100%**	**2,028,489,791**	**100%**	**2,129,914,281**	**BPKD**	**Pandeglang**
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Dokumen Standar Harga		1 Dok	150,000,000	1 Dok	25,000,000	1 Dok	157,500,000	1 Dok	165,375,000	1 Dok	173,643,750	1 Dok	182,325,937.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	-	1 Dok	25,000,000	1 Dok	26,250,000	1 Dok	27,562,500	1 Dok	28,940,625	1 Dok	30,387,656.25	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung -jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5 02 03 2 0 1 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		10 Dok	50,000,000	10 Dok	50,000,000	10 Dok	52,500,000	10 Dok	55,125,000	10 Dok	57,881,250	10 Dok	60,775,312.50	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-	1 Dok	25,000,000	1 Dok	26,250,000	1 Dok	27,562,500	1 Dok	28,940,625	1 Dok	30,387,656.25	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan Persediaan, Dokumen Laporan Pengelolaan BMD Bulanan, Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Persediaan dan BMD		24 Dok	100,000,000	816 Dok	50,000,000	816 Dok	105,000,000	816 Dok	110,250,000	816 Dok	115,762,500	816 Dok	121,550,625.00	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Juknis Pelaksanaan Inventarisasi BMD, Sosialisasi Juknis Inventarisasi BMD, Dokumen Berita Acara Inventarisasi BMD		-	-	1 Keg 69 Dok	50,000,000	1 Keg 69 Dok	52,500,000	1 Keg 69 Dok	55,125,000	1 Keg 69 Dok	57,881,250	1 Keg 69 Dok	60,775,312.50	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah		200 Dok	620,285,750	700 Dok	75,000,000	700 Dok	651,300,038	700 Dok	683,865,039	700 Dok	718,058,291	700 Dok	753,961,205.91	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah		150 Dok	100,000,000	150 Dok	50,000,000	150 Dok	105,000,000	150 Dok	110,250,000	150 Dok	115,762,500	150 Dok	121,550,625.00	BPKD	Pandeglang
		5 02 03 2 0 1 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD (Semesteran dan Tahunan)		-	-	2 Dok	22,000,000	2 Dok	23,100,000	2 Dok	24,255,000	2 Dok	25,467,750	2 Dok	26,741,137.50	BPKD	Pandeglang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun Ke 1		Tahun Ke 2		Tahun Ke 3		Tahun Ke 4		Tahun Ke 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP		
		5.02.03.2.0 1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen penetapan penggunaan BMD, dokumen pemanfaatan BMD, Dokumen Pemindahtanganan BMD, Dokumen Pemusnahan BMD, Dokumen Penghapusan BMD		21 Dok	310,000,000	21 Dok	50,000,000	21 Dok	325,500,000	21 Dok	341,775,000	21 Dok	358,863,750	21 Dok	376,806,937.50	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0 1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan BMD Bulanan		816 Dok	100,000,000	68 BA Rekon	50,000,000	68 BA Rekon	105,000,000	68 BA Rekon	110,250,000	68 BA Rekon	115,762,500	68 BA Rekon	121,550,625.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0 1.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Pengelolaan BMD Semesteran dan Tahunan		2 Dok	100,000,000	2 Dok	50,000,000	2 Dok	105,000,000	2 Dok	110,250,000	2 Dok	115,762,500	2 Dok	121,550,625.00	BPKD	Pandeglang
		5.02.03.2.0 1.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD		1 Keg	100,000,000	1 Keg	50,000,000	1 Keg	105,000,000	1 Keg	110,250,000	1 Keg	115,762,500	1 Keg	121,550,625.00	BPKD	Pandeglang
		JUMLAH					458,734,596,828		47,721,230,500		57,035,437,313		59,887,209,179		62,881,569,638		66,025,648,120		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan rumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021–2026, maka perlu kiranya diuraikan beberapa indikator kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021– 2026.

Dengan Visi "Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : " **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"**

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 – 2026 yaitu : " **PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"**

Adapun Misinya adalah :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah;

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 3 (tiga) program tahun 2021 - 2026, yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari pencermatan terhadap visi, misi dan program kerja bupati dan Wakil bupati memberikan gambaran peran serta Badan Pengelola Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

   Pada misi ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam mewujudkan pencapaian Misi 2 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

   Tujuan: **Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat**

   Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan

b. Pernyataan misi ke 4 : **Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industri kecil dan menengah**

   Pada misi ini, peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga berfokus pada tujuan dan sasaran pada RPJMD sebagai berikut:

   Tujuan: Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industri kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah

   Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dari ketiga program utama tersebut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2022 sebagaimana terlihat dalam Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keuangan								
1	Persentase Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase atas Hak Bukti Kepemilikan Atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang	15%	30%	50%	70%	90%	100%	100%	100%

6	Persentase Validitas Neraca Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakesholder terkait dengan pengertian bahwa Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan PD.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini merupakan upaya penggalian berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang. Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi internal PD sehingga menghasilkan presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan pelaksanaan visi dan misi. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul.

Oleh karena itu, komitmen di antara semua jajaran struktural Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang senantiasa dijungjung tinggi dalam melaksanakan rencana kerja secara maksimal agar hasil yang dicapai realistik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan ini diharapkan mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak berbagai faktor

yang sifatnya negatif atau yang mengganggu kesinambungan operasional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, 2021

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630303 198402 1 001